

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM  
MENANGANI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN  
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**

(Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya  
Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur)

**OLEH**

**MUH. RIZA HIDAYAT R.**

**B111 10 377**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2014**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM  
MENANGANI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG  
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**

(Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  
Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur)

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH. RIZA HIDAYAT R.

B111 10 377

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**

(Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  
Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur)

**Disusun dan diajukan oleh**

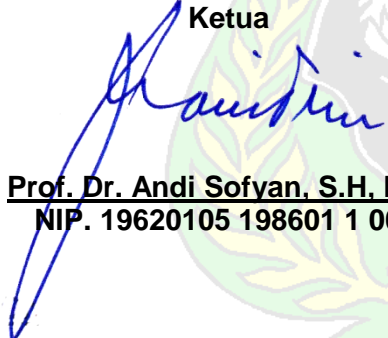
**MUH. RIZA HIDAYAT R.**

**B111 10 377**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 12 Juni 2014  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**


**Ketua**

  
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Sekretaris**

  
Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal dari mahasiswa :

Nama : Muh. Riza Hidayat R.

Nomor Induk : B 111 10 377

Bagian : Hukum Pidana

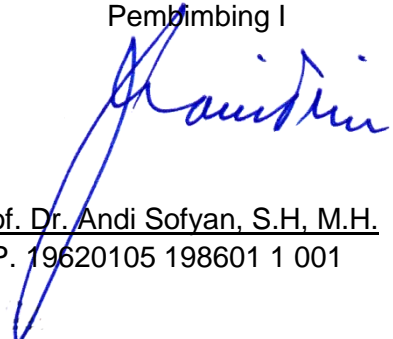
Judul : Tinjauan Yuridis Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 19 Mei 2014

Mengetahui,

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II

  
Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa proposal dari mahasiswa :

Nama : Muh. Riza Hidayat R.

Nomor Induk : B 111 10 377

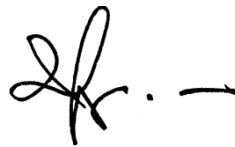
Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 19 Mei 2014

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademi



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 00

## ABSTRAK

**MUH. RIZA HIDAYAT R. (B11110377). “Tinjauan Yuridis Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (Studi Kasus Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur) Dibawah bimbingan Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Hj. Nur Azisa selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA dan faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta Timur dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Bidang Penindakan dan Penyidikan serta PPNS Bea dan Cukai selaku petugas yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan MMEA. Disamping itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Peran PPNS Bea dan Cukai dalam menangani dan mengungkap tindak pidana penyelundupan MMEA telah dilaksanakan dengan maksimal, , sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan. berdasarkan data tahun 2012 ada 10 kasus penyelundupan MMEA merugikan negara Rp. 46 milyar dan 2013 ada 8 kasus penyelundupan MMEA merugikan negara Rp. 44,5 milyar. (2) Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA ialah kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, jumlah penyidik yang relatif sedikit, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, seringkali PPNS Bea dan Cukai dimutasi. Dirjen Bea dan Cukai terus melakukan perbaikan untuk mengawasi pemasukan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur kita kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan berjudul ***“Tinjauan Yuridis Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta Timur)”***, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Abd. Rasyid S. dan Ibunda Hasnah R. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta doa yang tulus dan tak pernah putus. Terima kasih atas semangat dan perhatian yang diberikan sehingga penulis selalu dihargai dan dibanggakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan

guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.,Sp.BO. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor II, Wakil Rektor IV, yang berjuang keras untuk memajukan Universitas Hasanuddin dari taraf dan mutu pendidikan, fasilitas perkuliahan sehingga menjadi jauh lebih baik.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, yang berjuang keras meningkatkan taraf dan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H., selaku pembimbing II atas bimbingan yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muh. Said Karim, S.H.,M.H., Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H., dan Abdul Asis, S.H.,M.H., selaku tim penguji penulis.



5. Seluruh pihak di KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur khususnya kepada bapak Kasubsi Penindakan dan Penyidikan Bapak Orlando Haromongan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan pengalaman yang luar biasa, masukan dan kritikan membangun untuk penulis. Bapak Abd. Rasyid S. yang merupakan ayahanda tercinta saya salah satu pegawai KPPBC Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur yang selalu ada disetiap penulis membutuhkan informasi, yang sering mengantar ke lokasi penelitian tak kenal lelah dan selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya sehingga telah banyak membantu penulis dan memberi kelancaran serta kemudahan dalam melakukan penelitian.
6. Para dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Keluargaku yang telah mendukung khususnya pada saudara dan saudariku tercinta k'Rahayu Khaerunnisa dan adik tercinta Muh. Rodhi Habib. Yang selalu ada disetiap saya butuh, sering berbagi canda dan tawa disetiap hari-hari bersama.
8. Kepada M'Beloved yang InshaAllah menjadi tulang rusukku kelak Zahiyah Assegaf yang selalu memotivasi, mendoakan dan menemani

selama 5 tahun ini, berbagi suka duka dan canda, sehingga saya selalu semangat dalam melangkah.

9. Sahabat tercinta Wassaby Brotherhood's Bunda Dyah Tri Annisa, S.H., Andi Nurfadila Rukma, S.H., Wadjedah Nursyamsi, S.H., Roro Ayu Bujarani Gustyaningrum, S.H., Febrina Nurul Wardha, S.H., Kanda Onna Bustang, S.H., Nuryanto Al-tadom, Reyza Anugrah Basri, Muh. Fakhry Ibrahim, Andi Adiyat Mirdin, Muh. Hafiluddin, A. Azwad Anshari, Nur Hadi Halim, Irfai Herman, Mario Husain, Muh. Ansyar, Muh. Rizal Nurhabib Yusuf, A. Surya Nusantara Djabbar, Wawan, Adi, Mhule' sahabat perjuangan dari maba hingga menyelesaikan sarjana, sahabat yang selalu memberi tawa, canda, ilmu pengetahuan, dan tempat untuk berbagi duka dan air mata, terima kasih banyak untuk semuanya

10. UKM PSM Unhas terima kasih atas dukungannya dan telah diberi kesempatan berprestasi mengharumkan nama Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia dan Asia di Rimini, Italy. Terkhusus untuk WR 3 Bapak Nasaruddin Salam yang sering memberi wejangan di paduan suara dan pendidikan bagi kami anggota PSM UH, Kak Anshari Sanusi Selaku Pelatih dan Dirigent yang sangat banyak memberi dukungan, ilmu dalam bernyanyi yang baik, yang selalu berbagi tawa dan candanya, Prof. Itji Diana Daud selaku pembina PSM UH yang setia menemani kami semua dan selalu mendoakan kami agar

selalu beprestasi, K'uya Ketua PSM UH, K'Belly supersenior PSM UH, seluruh kaka senior, adik junior PSM UH yang telah membantu dan mendukung, terima kasih.

11. Saudara seperjuangan KKN Gelombang 85 Desa Bakka-Bakka, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman. K'Ciko, Fakhri, K'Winda Lestari, Enno, Shinta, Dilla, dan terkhusus Bapak dan Ibu Kepala Desa Bakka-Bakka Muh. Darwis, S.E., yang telah banyak mengajarkan kami makna kehidupan, kearifan lokal, dan bisa lebih menghargai alam, terima kasih atas pengalaman yang luar biasa ini.

Harapan saya semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi para penegak hukum.

Wassalamualaikum warhmatullahi wabarakatuh.

Penulis

Muh. Riza Hidayat R.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Yuridis .....	8
B. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	12
C. Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi .....	13
D. Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA).....	19
1. Pengertian Penyelundupan.....	19
2. Bentuk Penyelundupan.....	23
3. Pengertian Minuman yang Mengandung Etil Alkohol .....	25
E. Penyidikan .....	29
1. Pengertian Penyidikan.....	29
2. Pengertian Penyidik.....	31
a. Penyidik Polri.....	31
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	32
F. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	34
1. Pengertian Bea dan Cukai.....	34
2. Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai .....	36
3. Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis dan Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Teknik Analisis Data .....	46

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Peran dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan MMEA .....	47
1. Tugas dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai .....	47
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan MMEA .....	62
B. Faktor-faktor yang Menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan MMEA .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Diera globalisasi saat ini, sulit bagi suatu negara agar benar-benar dapat memenuhi kebutuhan sendiri dari hasil produksi negaranya. Oleh karena itu suatu negara akan membutuhkan dan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan negara lain, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kenyataan ini membuktikan bahwa betapa pentingnya perdagangan Internasional saat ini. Maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat didalam perdagangan baik perdagangan antar regional antar kawasan ataupun antar negara pada saat ini dan pada saat mendatang demi kemasukan dan devisa negara untuk menunjang pembangunan nasional suatu negara.

Perdagangan internasional memiliki manfaat karena dapat meningkatkan pendapatan negara, hal ini ditujukan dengan semakin bertambahnya penerimaan devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor (manfaat utama), dapat mencukupi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat atau belum mampu diproduksi dalam negeri, jadi perdagangan internasional sangat berpengaruh terhadap devisa negara.

Namun seiring perkembangan zaman, perdagangan internasional mengalami gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan negara

atau pendapatan devisa negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena terjadinya suatu kejahatan penyelundupan. Bentuk kejahatan inilah yang menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi, karena banyaknya uang negara yang tidak terpungut akibat dari kejahatan penyelundupan tersebut.

Uang dan devisa merupakan nafas suatu pemerintahan. Kehabisan atau kekurangan uang dan devisa suatu negara mengakibatkan malapetaka. Roda pemerintahan tidak dapat berjalan lancar, pembangunan akan macet, keamanan akan terganggu bahkan dapat menimbulkan anarki di dalam negara itu.

Kejahatan penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia karena letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas Negara Indonesia seluas 1,9 juta mil ( metrotv, 18 Oktober 2013, Pulau Indonesia berkurang 4.042 buah <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/JmlahPulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buah> diakses pada tanggal 26 Februari 2014,pukul 13.28 WITA).

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Kejahatan penyelundupan harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela dan negara akan mengalami kerugian besar. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara.

Salah satu barang yang sering diselundupkan di negara Indonesia yakni Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tercatat di tahun 2013



dari total 4.752 kasus, sebanyak 3.690 kasus datang dari aktivitas impor, ekspor sebanyak 237 kasus, fasilitas 128 kasus dan cukai sebanyak 697 kasus, diantara 4.752 kasus, terdapat 421 kasus penyelundupan MMEA, dan hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian hingga milyaran rupiah. (Liputan 6, 8 Januari 2014, Kasus penyelundupan MMEA <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/bea-cukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupan-sepanjang-2013>, diakses pada tanggal 11 Maret 2014, pukul 15.53 WITA).

Memperhatikan betapa kompleksnya masalah penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol mau tidak mau harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan, terkait dengan kasus penyelundupan, undang-undang kepabeanan dan cukai diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Hadirnya peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang memiliki peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam

pengangkutan barang baik dari dalam maupun diluar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Selain itu pejabat bea cukai juga berwenang melakukan audit cukai terhadap berbagai pihak yang terkait seperti pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur. Audit cukai dimaksudkan untuk menilai kepatuhan pihak-pihak tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada dasarnya telah berusaha memberantas kejahatan penyelundupan terutama penyelundupan MMEA dengan melalui peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pejabat bea dan cukai sebagai penindak atau pelaksana tugas dari peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, namun usaha tersebut belum memuai hasil yang maksimal karena setiap tahun kejahatan penyelundupan MMEA semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari maraknya peredaran minuman yang mengandung etil alkohol yang di perjualbelikan secara bebas dan murah karena tidak memiliki pita cukai, sehingga negara mengalami kerugian yang besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penulisan mengenai “Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

1. Untuk mengetahui peran PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara umum, untuk menjadi bahan pengetahuan terkait peran PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan.
2. Secara praktis, dengan mengetahui faktor-faktor yang menghambat selama ini, aparat dapat melakukan perbaikan terhadap upaya yang telah dilakukan guna mengurangi meningkatnya tindak pidana penyelundupan MMEA.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana hukum materiil, khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.

#### **B. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Adami Chazawi (2005:67) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah :

“Tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana”.

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam

berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana (Sudarto, 1986:31-32), yaitu:

a. Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”.

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons (Lamintang, 1997:185) tindak pidana adalah :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Dengan batasan seperti ini menurut Simons (Tongat, 2008:105), untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

*Strafbaarfeit* yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Andi Zainal Abidin (1987:250) menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab”.

Lebih lanjut Menurut Prodjodikoro (1986:55) yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa:

“Suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.

Van Hammel (Andi Zainal Abidin, 1987:250) yang berpandangan monistis juga merumuskan *strafbaarfeit* bahwa,

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”.

#### b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis

memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis (Tongat, 2008:106), yaitu:

“Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana”.

Pandangan dualistis justru berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut adalah hanya perbuatannya saja, sedang pertanggungjawaban dan kesalahannya tidak termasuk pada perbuatan pidana dimaksud. Menurut pandangan dualistis yang diancam pidana itu adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang atau hanya berupa rumusan undang-undang saja. Artinya terhadap suatu perbuatan pidana belum dapat diatuhkan pidana, bila tidak ada orangnya dan pada orang yang dimaksud dan harus ada sifat melawan hukum atau kesalahan pada orang itu (James Pardede, 2007:22).

Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggung jawaban pidana. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh sarjana yang menganut pandangan dualistis Menurut Pompe (Sudarto, 1986:31-32) :

“Dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat



melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, adapun unsur-unsur tindak pidana karena perbuatan atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, menurut Tongat ( 2008:107) sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana; dan
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Menurut doktrin (Leden Marpaung, 2009:10) unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua unsur, yaitu :

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).  
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

## b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif (*act*) dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan (*omission*).
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia.  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan- kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan- keadaan (*circumstances*).  
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan menjadi keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan pelaku itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

## C. Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi

Andi Hamzah (1988:15) mengemukakan bahwa:

“Tindak pidana penyelundupan ialah semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana”.

Oleh karena itu perlu dikemukakan di sini bahwa untuk mengetahui seluk beluk tindak pidana penyelundupan itu kita harus mengetahui dan menelaah bahwa :

### 1. Ordonansi Bea (Rechten Ordonantie)

Ordonansi Bea (Rechten Ordonantie), telah diciptakan sejak tahun 1882, yaitu Sbl.1882 Nomor 240, diumumkan lagi dalam tahun 1931 dengan

Sbld.1931 Nomor 471 sejak itu telah diubah berkali-kali, dengan Sbld. 1932 Nomor 212, 1935 Nomor 149, 1935 Nomor 584, 1936 Nomor 702 dan 1948 Nomor 43 dan LN 1951 Nomor 10, 1951 Nomor 39, dan 1954 Nomor 11. Pada ordonansi itu dilampirkan Reglemen A dan Reglemen B.

Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 Ordonansi Bea (Rechten Ordonnantie) ini dimasukkan ke dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955). Dengan demikian, pelanggaran terhadap Ordonansi Bea (Rechten Ordonnantie) dengan sendirinya menjadi tindak pidana ekonomi. Akibat dari yuridis dari ketentuan ini adalah bahwa semua ketentuan khusus yang ada dalam UUTPE tersebut berlaku juga bagi tindak pidana penyelundupan tindak pidana yang melanggar Ordonansi Bea .

Ketentuan tersebut antara lain mengenai sanksi pidana,. Semua sanksi pidana di dalam Ordonansi Bea menjadi larut dan tidak berlaku lagi, diisap oleh ketentuan mengenai sanksi pidana dan tindakan tata tertib yang ada dalam UUTPE.

Perincian tentang ketentuan-ketentuan khusus UUTPE ialah, menurut Pasal 26e Ordonansi Bea, maka hanya tindak pidana yang disebut di dalam Pasal 26b saja yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Berdasarkan penafsiran *a contrario*, maka yang tersebut di dalam Pasal 25 merupakan

pelanggaran. Sanksi yang semula ditentukan di dalam Pasal 26 untuk pelanggaran Pasal 25 itu memang hanya berupa denda saja walaupun tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, yang berarti pembuat Ordonansi Bea memang maksudkan pelanggaran terhadap delik yang tersebut di dalam Pasal 25 itu sebagai pelanggaran karena ancaman pidananya hanya denda saja, berbeda dengan ancaman pidana dalam Pasal 26b yang berupa pidana penjara.

Dengan demikian, peraturan yang tercantum dalam UUTPE berlaku umum bagi tindak pidana penyelundupan, sedangkan yang diatur khusus di dalam Ordonansi Bea menjadi aturan Khusus (*lex specialis*). Tetapi beberapa ketentuan khusus di dalam Ordonansi Bea, khususnya tentang pemidanaan tetap berlaku seperti ditentukan di dalam Pasal 26b alinea kedua, yang mengatakan bahwa barang-barang terhadap mana tindak pidana penyelundupan dilakukan dirampas. Jadi, bukan dapat dirampas, yang berarti ketentuan ini bersifat imperatif.

Pada Pasal 26d dikatakan bahwa keputusan-keputusan hakim yang mengandung pidana denda. Jika berurutan dengan badan-badan hukum dapat dilaksanakan atas harta bendanya. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sama dengan pelaksanaan yang ditetapkan untuk keputusan-keputusan hakim dalam perkara-perkara perdata, dengan pengertian, bahwa, jika ketentuan-ketentuan dari hukum acara perdata yang berlaku untuk si

terpidana menuntut perantara seorang pembesar pengadilan, maka perantara itu diminta oleh pegawai yang berkewajiban untuk melaksanakan keputusan hakim (A. Hamzah, 1988:15).

## 2. Kaitan Antara Ordonansi Bea dan UUTPE

Dalam hal subyek tindak pidana penyelundupan pun telah menjadi luas dengan ditariknya menjadi tindak pidana ekonomi. Terjadi perluasan pelaku tindak pidana, yaitu selain meliputi orang sebagai subyek, juga badan hukum. Jadi, suatu badan hukum misalnya, PT, CV dan lain-lain yang melakukan penyelundupan dapat dijatuhi pidana.

Perubahan subyek hukum pidana menjadi hanya manusia saja ialah dengan berlakunya W.v.S. Nederland 1881 (Andi Hamzah, 1988:18). Hal ini dapat disimpulkan :

1. Menurut Memorie van Toelichting Artikel 51 W.v.S.N. suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana.
2. Hampir semua pasal KUHP dimulai dengan "*hij, die,*" (barang siapa), sering pula disebut faktor manusia seperti sengaja dan lalai (culpa).

3. Sistem pidana yang terdiri dari pidana badan dan kekayaan, yaitu pidana mati, penjara dan denda hanya dapat dikenakan kepada manusia.
4. Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana tidak mengenal tatacara tentang korporasi.

Pengertian badan hukum di dalam UUTPE sebenarnya luas, tidak hanya bagi yang mendapat pengakuan sebagai badan hukum, tetapi juga perserikatan dan yayasan. Perserikatan orang dari terjemahan bahasa Belanda "*enige anderew vereniging van personen*" dan "*een dolevermogen*".

Penjelasan Pasal 15 mengatakan bahwa, orang itu harus bertindak dalam badan hukum itu. Jadi, memperluas dapatnya dituntut badan hukum dan lain-lain itu, sehingga orang yang tidak mempunyai hubungan kerja pun, tetapi bertindak dalam badan hukum itu dalam bertanggung jawab pidana.

Sebelum Ordonansi Bea masuk ke dalam ruang lingkup UUTPE, maka hanya orang sebagai subyek kerana KUHP dalam Pasal 59 menentukan bahwa badan hukum tidak dapat menjadi subyek dalam hukum pidana. Sebagaimana diketahui Pasal 103 KUHP menentukan bahwa ketentuan umum yang tercantum di dalam ke-8 bab yang pertama Buku I (termasuk Pasal 59) berlaku juga bagi perundang-undangan pidana di luar KUHP. Jadi,

berlaku juga bagi tindak pidana yang melanggar Ordonansi Bea (sebelum dimasukkan ke dalam UUTPE).

Setelah dimasukkan ke dalam UUTPE, maka keadaannya berubah, seperti disebut di atas, badan hukum yang melakukan tindak pidana penyelundupan dapat dipidana. Selain daripada itu, dengan dimasukkannya Ordonansi Bea ke dalam UUTPE, maka tindak pidana penyelundupan dapat diadili tanpa hadirnya terdakwa (peradilan *in absentia*) seperti dikenal dalam UUTPE, Pasal 16.

Tetapi patut diperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 UUTPE bahwa pidana yang dijatuhkan dalam peradilan *in absentia* terbatas pada perampasan barang-barang yang telah disita. Jadi, tidak mungkin dijatuhkan pidana penjara dan denda.

Menurut Pasal 16 UUTPE, ada dua macam perkara yang dapat diajukan secara *in absentia*, yaitu pelaku yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat (1)) dan yang kedua ialah orang yang tidak dikenal, tidak tertangkap, misalnya penyelundup yang meninggalkan barang-barang selundupannya, melarikan diri dan tidak dikenal identitasnya, bukan orang yang dikenal identitasnya tetapi melarikan diri, sehingga tidak diajukan ke pengadilan.

## **D. Penyelundupan Minuman Yang mengandung Etil Alkohol**

### **1. Pengertian Penyelundupan**

Istilah “penyelundupan”, ”menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa (1984:24) ialah sebagai berikut :

“Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris;smuggle;bahasa belanda;smokkel) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Douaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler”.

Pengertian penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa:

“Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”

Definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan



pemasukan atau pengeluaran barang adalah tindak pidana penyelundupan dan membatasi hanya pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, tidak termasuk antar pulau. Menurut Andi Hamzah (1988:1) perumusan tersebut terlampau luas dan tidak yuridis, karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan. Tentulah maksud pembuat peraturan tersebut tidak demikian, tetapi sejajar dengan pengertian *Smuggling* dalam The Lexicon Webster Dictionary, yang berbunyi :

“To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties”(memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

Pengertian terakhir ini lebih mendekati pengertian yuridis tetapi berbeda sedikit dengan pengertian tersebut, yang diartikan dengan penyelundupan dalam tulisan ini ialah semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea (*rechten ordonnantie* ) dan diancam pidana.

Pengertian penyelundupan menurut Adam Smith (Yudi Wibowo Sukinto, 2013:39)

*“A smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so”.*(Terjemahan bebas: Penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia

buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu).

Dalam penulisan ini pengertian penyelundupan, tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara. Karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud *United State Customs an Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi lebih dikenal dengan sebutan imigran gelap. Sedangkan menurut Elizabeth A Martin (Yudi Wlbowo Sukinto,2013:40) memberi pengertian penyelundupan ( *smuggling* ) sebagai:

*“The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggle good are liable to confiscation and smuggler is liable to pay treble their value or a sum laid down by the law ( whichever is greater); offender may alternatively, orraditinally, receive a term of imprisonment”.*( terjemahan bebas: penyelundup adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai).

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun keluar negeri tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum.

Dasar menetapkan terjadinya tindak pidana penyelundupan, walaupun barang-barang masih sementara diangkut di lautan asal sudah memasuki perairan 12 mil, sebenarnya bukan masalah baru. Karena seyogyanya barang-barang itu sudah harus dipungut bea-beanya pada waktu memasuki garis 12 mil. Akan tetapi dalam praktek, baru ditindak setelah barang-barang itu dibongkar, oleh karena tiada mungkin kantor-kantor Douane didirikan di perairan (titik batas 12 mil itu) dan tidak mungkin pula suatu pesawat terbang yang sementara terbang diperiksa di udara walaupun kapal terbang itu sudah memasuki wilayah udara kita. Sehingga prakteknya, menunggu kapal-kapal laut dan kapal-kapal terbang merapat dipelabuhan dan mendarat di bandara, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan.

Sumber-sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol adalah Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan serta Undang-undang No.39 Tahun 2007

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* daripada undang-undang lain terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas.
- b. Undang-undang tersebut mengatur secara detail tentang barang-barang yang diekspor maupun diimpor beserta prosedur dari kegiatan ekspor dan impor, serta sanksi bagi yang melanggarnya sebagai suatu tindak pidana.

Dalam undang-undang kepabeanan, pemberian terhadap pelanggar undang-undang tersebut lebih diutamakan dengan pemberian denda, karena pembuat undang-undang beranggapan dengan diterapkannya pidana denda dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana di bidang kepabeanan. Dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenal pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

## **2. Bentuk-bentuk Penyelundupan**

Penyelundupan dibagi atas dua bentuk, penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik :

### **1. Penyelundupan Administratif**

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi

kualitas maupun dari segi kuantitas sebagai contoh: pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan) kepada petugas Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga (bisa terjadi juga kedua-duanya atau ketiga-tiganya)

## 2. Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Controh: pemasukan barang-barang dari Freeport Sabang (umumnya asal bar dari Singapura) dengan alat pengangkut kapal-kapal laut, motor boat dan perahu-perahu ke pantai-pantai daratan aceh yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun dan dibongkar di pantai-pantai yang biasanya dilakukan pada malam hari.

Menurut Ali Said (Baharuddin Lopa, 1984:63) mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu :

“Penyelundupan administratif memiliki dokumen resmi namun opgave-nya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik karena karena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen yang dipalsukan”.

### **3. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol ( MMEA )**

Dewasa ini sangat banyak jenis-jenis barang yang diselundupkan baik melalui darat, laut dan udara, salah satu barang yang banyak diselundupkan yakni minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA ) atau lebih dikenal dengan minuman keras, tercatat ada 421 kasus yang terjadi di Tahun 2013 yang mengakibatkan negara mengalami kerugian milyaran rupiah.

Minuman yang Mengandung Etil Alkohol menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi :

1. Etil Alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya.

MMEA dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku yang mengandung karbohidrat, misalnya: biji-bijian, buah-buahan, nira, atau yang dibuat dengan destilasi hasil fermentasi atau yang sengaja menambahkan alkohol didalamnya. MMEA disebut juga minuman keras atau minuman beralkohol, dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak, dan lain-lain. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol atau minuman beralkohol dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan pembuatannya yaitu :

1. Minuman keras hasil fermentasi, Fermentasi dalam bahasa Indonesia berarti peragian, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dan CO<sub>2</sub> dengan bantuan ragi. Contohnya adalah produk bir dan wine.
2. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan, ini adalah proses pemanasan dan pendinginan kembali. Maksudnya untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Minuman ini dihasilkan dari biji-bijian seperti whisky, dari buah-buahan seperti brandy, dari air tebu seperti rum, dan lain-lain.

Selain itu MMEA memiliki varian-varian tertentu berdasarkan bahan pembuatannya dan kadar etanol yang dikandungnya. Berikut jenis-jenis minuman keras alkohol dengan kadar etanol yang dimilikinya :

- Bir 3-5%
- Wine 9-18%
- Anggur obat 9-18%
- Liquor Min 24%
- Whisky Min 30%
- Brandy Min 30%
- Cognac Min 35%
- Gin Min 38%
- Rum Min 38%
- Arak Min 38%
- Vodka Min 40%

Di Indonesia minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Impor atau pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan khusus oleh importer khusus. Di samping MMEA impor, Bea Cukai juga memiliki kewenangan untuk mengontrol secara penuh pendirian pabrik MMEA dalam negeri. Setiap badan usaha yang hendak



memproduksi MMEA, maka ia wajib memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai).

Pengawasan MMEA di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DJBC, namun juga oleh pemerintah daerah. Mengingat efek negatif yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi MMEA tersebut.(Wikipedia, 3 November 2013, *Minuman yang Mengandung Alkohol*, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol). di akses pada tanggal 3 Februari 2014 Pukul 15.46)

Berdasarkan Keppres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Golongan A : kadar etanol 1-5% (Bir Bintang dan Green Sands).
2. Golongan B: kadar etanol 5-20% (Anggur Malaga).
3. Golongan C: kadar etanol 20-55% (Brandy dan Whisky).

## **E. Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kibat ketentuan-ketentuan yang ada dalam rumusan

peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.

Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Bambang Waluyo (2008:44) mengemukakan bahwa :

“Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi”.

Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik (vide Pasal 105 KUHP). Menurut Andi Sofyan (2013:87) menerangkan bahwa :

“Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering sekali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan”.

Oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana menjelaskan tentang hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya.

## **2. Pengertian Penyidik**

Penyidik merupakan orang yang melakukan penyidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan yakni terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan sebagai tahapan lanjut dari penyelidikan yakni pejabat penyidik Polri dan pejabat pegawai dari negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

### **a. Penyidik Polri**

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “pejabat Polisi Negara”. Mengingat dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam KUHAP Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

“Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”

Berdasarkan bunyi Pasal 6 ayat (2) diatas syarat kepangkatan penyidik diatur oleh PP Nomor 27 Tahun 1983 yakni Pasal 2 ayat (1) a dan ayat (2), yang berbunyi :

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor kepolisian yang yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Rumusan diatas menggambarkan bahwa tidak semua polisi yang berpangkat pembantu letnan dua polisi dan pangkat keatasnya menjadi penyidik. Apabila tidak ada yang berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor atau kepala kepolisian sektor yang pangkatnya di bawah pembantu letnan dua (pelda) *ex officio* menjadi penyidik. menurut ahli hukum Andi Hamzah (Bambang Waluyo, 2008:44):

“Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenagnan (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda”.

#### **b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah dari instansi kepolisian, masih sedikit yang mengetahui pejabat pegawai negeri sipil juga memiliki

wewenang untuk melakukan penyidikan. Namun, tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan. Beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyidikan oleh PPNS, antara lain

- a. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun tentang Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pasal 6 ayat (2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat kepangkatan PPNS diatur oleh peraturan pemerintah (PP). Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 2. Melalui PP Nomor 27 Tahun 1983 diatur perihal :

1. PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/B) atau yang disamakan.
2. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Tembusan usul disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepala Kepolisian RI, guna kepentingan pembuatan rekomendasi.
3. Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil ialah :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- b. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
- c. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (3)).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

## **F. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

### **1. Pengertian Bea dan Cukai**

Penerimaan pendapatan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui bea cukai. Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Keberadaan kedua lembaga tersebut sangat berhubungan erat terkait dengan upaya

pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun perlu diketahui, Meskipun kedua lembaga tersebut berada dibawah Kementerian Keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah. Bea dan Cukai menurut Burhanuddin (2013:9) :

“Pengertian Bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Di forum internasional bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Burhanuddin, 2013:18) .



## **2. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada digaris depan wilayah wilayah kesatuan Republik Indonesia. DJBC melaksanakan sebagai tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi (Burhanuddin, 2013:18) :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Penerimaan negara melalui cukai adalah menjadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai :

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk menjalankan undang-undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- c. Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Di samping kewenangan yang bersifat umum, undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan, berdasar Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, untuk :

- a. Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini;
- b. Atau mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Berdasarkan undang-undang diatas, Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda apabila

orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan, bukan kesalahan yang disengaja, atau kesalahan tersebut terjadi akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengan serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Dalam melaksanakan kewenangannya pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Mengingat besarnya bahaya penggunaan senjata api bagi keamanan dan keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi.

Menurut undang-undang pejabat bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya yang bersifat mengikat bagi termohon.

Pejabat bea dan cukai juga memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus dibidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam hal ini pejabat bea dan cukai merupakan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan sesuai dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan terkait kejahatan kepabeanan dan cukai. Wewenang pejabat bea cukai dalam melakukan penyidikan terdapat juga didalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang berbunyi :

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus ebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan”.

Didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Penyidik Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

- h. Mengambil sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditegaskan bahwa :

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai”.

Didalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai , Penyidik Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang :

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Cukai;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai;
- d. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Cukai;
- e. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

- f. Mengambil sidik jari orang;
- g. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- h. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Cukai;
- i. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cukai;
- j. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cukai;
- k. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Cukai;
- l. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- m. Menghentikan penyidikan;
- n. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut M. Yahya Harahap (2006 :113) meskipun memiliki kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan

penyidikan, tapi harus tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri, sebagai berikut:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini penyidik bea dan cukai kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik dan di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (3)).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

Meskipun PPNS tertentu memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tetap harus melakukan koordinasi kepada Polri.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian proposal ini menuju kepada penulisan skripsi, Penulis memilih lokasi penelitian terkait dengan judul skripsi Penulis di Kota Jakarta Timur, yakni di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur. Subyek penelitian adalah sumber tempat seseorang memperoleh data atau keterangan penelitian. Yang menjadi obyek penelitian disini adalah tindak pidana penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) maka yang menjadi subyek penelitian adalah setiap orang yang mempunyai relevansi dengan persoalan yang menjadi pokok tentang hal-hal yang akan dibahas kemudian.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penulisan skripsi adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan jenis sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan mengadakan observasi dan

wawancara interview pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas.

2. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan MMEA.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data atau informasi yang diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan dengan wawancara dan Tanya jawab dengan aparat yang berkompeten, dalam hal ini adalah Pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik tindak pidana penyelundupan MMEA.

#### **D. Analisis Data.**

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis dengan secara deskripsi, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan rinci serta terarah yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan MMEA.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pengertian penyidikan diatur di dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dibidang Kepabeanan dan Cukai tindakan penyidikan dilakukan sebagai tindak lanjut dari langkah penemuan suatu tindak pidana penyelundupan untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga perbuatan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Tindakan ini sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan, karena penyelundupan merupakan suatu tindak pidana yang merugikan negara yang bisa mengakibatkan lemahnya perekonomian negara karena banyaknya uang negara yang tidak terpungut akibat tindak pidana penyelundupan.

#### **A. Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan MMEA**

##### **1. Tugas dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai**

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas

tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi :

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara kepada PPNS Bea dan Cukai di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta yaitu Abd. Rasyid S. beliau memberikan gambaran tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai berikut :

“PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Berdasarkan hasil wawancara yang beliau kemukakan sesuai dengan dasar-dasar hukum penyidikan tindak pidana antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.

- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai
- j. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- k. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- l. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdikusuma Jakarta yaitu Orlando Haromongan, beliau mengemukakan tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah :

“Menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut , Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsi (Zainal Abidin,2011:10) :

- a. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
- b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai.
- d. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika.



- e. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Struktur Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

- 1) Subdirektorat Intelijen
- 2) Subdirektorat Penindakan
- 3) Subdirektorat Penyidikan
- 4) Subdirektorat Sarana Operasi
- 5) Subbagian Tata Usaha
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan data diatas tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif , yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan MMEA dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana penyelundupan MMEA ini tidak semakin merugikan negara.

Usaha preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut .agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak Pidana penyelundupan.

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai itu sendiri berada

dibawah seksi penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Dalam hal penegakan hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dilakukan dibawah Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Orlando Haromongan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur menerangkan bahwa tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan ialah :

“Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api”.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi :

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan adalah mutlak kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan, mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Namun berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai bahwa, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tindak pidana Kepabeanan atau

tindak pidana penyelundupan dalam situasi tertentu. Yang dimaksud “dalam situasi tertentu” adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan fasilitas patroli atau kapal pemburu sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal, serta apabila pelaku tertangkap tangan oleh Pejabat Polri.

Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, oleh karena itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum acaranya, bahwa penyidik Polri tidak memiliki kewenangan khusus. Hal ini juga didasari dari sifat yang khusus pula untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana Kepabeanan yang terjadi, Dengan demikian idealnya, dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, tapi proses Penyidikan Oleh PPNS Bea dan Cukai harus tetap berkoordinasi dengan Penyidik Pori.

Tugas dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai sangat besar dalam menjaga dan mengamankan keuangan negara dari praktik-praktik tindak pidana penyelundupan. Karena salah satu pendapatan besar negara Indonesia adalah penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, disinilah peran PPNS Bea dan Cukai untuk menjaga keuangan negara dan mengawasi segala

kegiatan yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai misalnya kegiatan ekspor, impor, pembayaran cukai, dan fasilitas.

Pendapatan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pendapatan negara yang optimal ini merupakan fungsi DJBC yaitu *revenue collector*. Salah satu peran DJBC yang utama yang dapat diukur *outcome-nya* (hasil) adalah pendapatan negara yang optimal yaitu tingkat pencapaian jumlah penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Apabila tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan MMEA maka pendapatan negara akan berkurang karena banyaknya uang negara dari hasil bea masuk dan bea keluar yang tidak terpungut.

Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sangat banyak diselundupkan dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, penyelundupan MMEA di Indonesia menggunakan berbagai macam modus baik melalui darat dan laut. Berkaitan dengan wawancara Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Orlando Haromongan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Halim Perdanakusuma Jakarta timur beliau menerangkan :

“Tindak pidana penyelundupan MMEA tidak terjadi diwilayah pabean Bandara Halim Perdanakusumah atau tidak ada MMEA yang

diselundupkan melalui udara atau pesawat terbang, karena bisa meledak didalam pesawat, jadi pada dasarnya penyelundupan MMEA terjadi diwilayah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau diselundupkan melalui kapal laut.

Dari hasil wawancara tersebut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Orlando Haromongan memperlihatkan data-data penyelundupan MMEA di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada tahun 2012 dan 2013. Tercatat di Tahun 2012 ada 10 kasus penyelundupan MMEA yang berjumlah 104.057 botol dengan berbagai jenis seperti wine, vodka, liqueur, bir, whisky, cognac, rum, arak, dan gin min. Total potensi kerugian negara pada tahun 2012 akibat tindak pidana penyelundupan MMEA berjumlah Rp. 46 milyar. Berdasarkan data ada 6 kasus tindak pidana penyelundupan yang berhasil diungkap PPNS Bea dan Cukai dan diserahkan ke Penuntut Umum.

Tindak pidana penyelundupan MMEA ditahun 2013 berdasarkan data terdapat 8 kasus penyelundupan MMEA yang berjumlah 4.524 kardus yang masing-masing kardusnya berisi 25 botol minuman dengan berbagai jenis dan merek berasal dari Korea seperti Natural Soju, dan berbagai merek, seperti Rose Mount, Lindemans, Amarula, Jhonny Walker, Smimofm Jack Daniels, Chateu Noirac, Alexis Lichine, Sauvignon Hacienda, Queen Adelaide, dan Drostdy Hof. Sehingga total kerugian negara mencapai Rp. 44,5 milyar. Dari 8 kasus penyelundupan MMEA pada tahun 2013 ada 5 kasus yang berhasil diungkap PPNS dan diserahkan ke Penuntut Umum.



Dari kedua data diatas terlihat ditahun 2013 tindak pidana penyelundupan mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan, hal ini dikarenakan upaya PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem demi menyelamatkan uang negara, serta semakin ketatnya proses pemeriksaan setiap adanya kegiatan impor, sehingga memperkecil ruang gerak para penyelundup.

Dari hasil wawancara dengan PPNS Bea dan Cukai Kusniadi di KPPBC Tanjung Priok Jakarta Utara mengatakan :

“Modus operandi impor minuman keras illegal bermacam-macam, mulai dari impor menggunakan pemberitahuan pabean melalui barang pindahan, memalsukan data impor, hingga menggunakan nama perusahaan lain. Sehingga diperlukan perbaikan sistem agar penyelundupan MMEA dapat berkurang, karena dalam proses penyelundupan para pelaku semakin hari menggunakan berbagai macam modus agar tidak tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai”.

Berbagai macam usaha dilakukan oleh para pelaku penyelundupan, agar tidak membayar pungutan bea masuk, salah satu modus yang sering digunakan pelaku ialah dengan melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada, misalnya didalam PIB tertulis barang angkutan kapal berisi minuman ringan, buah-buahan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang angkutan berisikan MMEA.

Berbagai macam upaya telah dilakukan demi memberantas tindak pidana penyelundupan MMEA, pemerintah telah membuat Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, hukuman tertinggi bagi pelaku penyelundupan atau yang melakukan tindak pidana dibidang Kepabeanan disebutkan pada Pasal 102B apabila terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan maka dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan pada pasal 102C menjelaskan apabila perbuatan tindak pidana sebagaimana termaktub pada pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai ditambah 1/3 (satu pertiga).

Penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penyelundupan pada dasarnya dikenai dua sanksi pidana, membayar denda dan penjara, namun kenyataan yang ada kebanyakan kasus penyelundupan pelaku hanya membayar denda sebagai ganti rugi dari uang pungutan bea masuk dan bea keluar, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan menjelaskan demi kepentingan penerimaan negara. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai atas permintaan Menteri Keuangan.

Kemudian diberinya kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam menangani setiap kasus penyelundupan memberi kemudahan para petugas Bea dan Cukai untuk menindak kasus-kasus tersebut.

## **2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan MMEA**

Dalam proses penyidikan, PPNS Bea dan Cukai berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar diserahkan ke Penuntut Umum. Dalam tindak pidana Kepabeanan suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari :

### **a. Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHP)**

Tindakan yang melanggar hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.

### **b. Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHP)**

Definisi tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan

atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana.

c. Diketahui Langsung oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHAP)

Jika suatu tindak pidana Kepabeanan dan Cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Setelah diketahui adanya suatu tindak pidana melalui laporan, tertangkap tangan ataupun disaksikan langsung oleh penyidik maka dapatlah selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri sekurang-kurangnya dengan laporan kejadian dan Surat Perintah Tugas Penyidikan. Pengertian “dimulainya penyidikan” adalah saat Surat Perintah Tugas Penyidikan dikeluarkan atau ditandatangani yang kemudian diikuti kegiatan kegiatan dari penyidik seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya yang mana dalam membuat semua surat yang berkaitan dengan tindakan penyidik diberi kata-kata “untuk keadilan”.

Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan PPNS Bea dan Cukai oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Apabila SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Karena tidak terdapat cukup bukti, meliputi juga SPDP yang daluwarsa karena tidak terdapat cukup bukti;
- b. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam kasus tindak pidana Kepabeanan dalam hal ini tindak pidana penyelundupan MMEA paling sering terjadi karena tertangkap tangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Orlando Haromongan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Halim Perdanakusuma Jakarta Timur mengatakan :

“Berdasarkan data lapangan, kebanyakan kasus penyelundupan MMEA itu karena tertangkap tangan oleh petugas-petugas yang melakukan patroli, maupun pada saat merapat di wilayah pabean dalam hal ini pelabuhan Tanjung Priok, kemudian diminta dokumen-dokumennya dan diperiksa isi muatan kontainernya, jika tidak ada dokumen-dokumennya maupun pemberitahuan pabean secara salah maka akan langsung dilakukan pemeriksaan selanjutnya”.

Apabila dalam kasus tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyelundupan MMEA, namun yang melakukan penangkapan adalah pegawai Bea dan Cukai biasa bukan dari PPNS Bea dan Cukai, maka pegawai tersebut dapat melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya meskipun tanpa ada surat perintah, hal ini dilakukan agar pelaku tidak melarikan diri. Sedangkan dalam melakukan penggeledahan dan

penyitaan harus ada izin dari Pengadilan setempat. Segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik yang berwenang atau dalam hal ini PPNS Bea dan Cukai, apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari pegawai Bea dan Cukai maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

#### **B. Faktor-faktor yang Menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan MMEA**

Pada dasarnya PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA sudah bertindak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberi keluasaan bagi PPNS untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan MMEA. Namun disetiap keluasaan yang diberikan tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran PPNS Bea dan Cukai dalam mengungkap suatu tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Orlando Haromongan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta timur menerangkan :

“Faktor-faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menangani kasus penyelundupan dikarenakan tenaga penyidik yang kurang karena berdasarkan peraturan terkait PPNS Bea dan Cukai minimal harus golongan II/a sementara golongan II/a keatas

jumlahnya kurang karena banyaknya golongan II/a keatas menduduki jabatan struktural, dan adanya peraturan bahwa pegawai Bea dan Cukai sering dilakukan mutasi sehingga menyulitkan untuk menentukan PPNS Bea dan Cukai”.

Hal ini juga tertulis didalam Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2013, pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang mana kendala-kendala tersebut akan sangat berpotensi menghambat kinerja proses penyidikan pada tahun-tahun mendatang yaitu :

- a. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1.
- b. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar keseluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.



- c. Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.
- d. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.
- e. Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minim dan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan.

Salah satu faktor meningkatnya tindak pidana penyelundupan karena masyarakat masih lemah akan sadar hukum dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku penyelundupan masuk ke Indonesia karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkualitas dengan harga murah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA, telah dilakukan dengan maksimal, terbukti banyaknya kasus penyelundupan MMEA yang berhasil ditangkap, hadirnya Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Cukai semakin memberi keluasaan kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam proses penyidikan PPNS Bea dan Cukai berpedoman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta didalam Pasal 7 KUHP.
2. Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan MMEA disebabkan karena kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil yang mengharuskan PPNS minimal golongan III/a berdasarkan peraturan Kementerian

Hukum dan HAM, Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti alat detector, alat penginderaan jarak jauh, serta kapal patroli Indonesia yang masih kurang canggih.

## **B. Saran**

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Mengingat tindak pidana penyelundupan sangat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat aturan agar PPNS Bea dan Cukai yang memiliki keterampilan tidak di pindah tugaskan secara terus menerus karena hal ini mengakibatkan krisis akan

penyidik, upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komperhensif melibatkan seluruh instansi terkait tanpa ada sekat antar instansi, serta harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran penindakan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan, mengingat banyaknya modus yang digunakan pelaku agar tidak membayar biaya bea masuk dan bea keluar sehingga merugikan negara, jadi dibutuhkan PPNS yang memiliki keterampilan dan fasilitas penyidikan yang menunjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Republik Institute.
- Andi Hamzah. 1988. *Delik-Delik Penyelundupan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Zainal Abidin. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik)*. Jakarta: Prapanca.
- Baharuddin Lopa. 1984. *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia.
- James Pardede. 2007. *Diktat Hukum Pidana*. Universitas Bung Karno.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni
- Tongat. 2008. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Projudikoro. 1986. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Yudi Wibowo. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaiinal Abidin. 2011. *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta: PUSDIKLAT Bea dan Cukai.

### **UNDANG-UNDANG :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1995 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Penyelundupan

**SUMBER LAIN :**

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/JmlahPulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buah>

<http://bisnis.liputan6.com/read/795090/bea-cukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupan-sepanjang-2013>

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol)